

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
	<i>N Tedia (trichotefig)</i>	10	26-7-2002

Ribuan Karyawan PT PLN Demo

■ Pekerja Pabrik Boneka Tuntut Pesangon

JAKARTA (Media): Ribuan karyawan koperasi PT PLN se-Jakarta dan Tangerang, kemarin, menggelar aksi demo di Kantor PT PLN Kebayoran Baru, Jl Sisingamangaraja (CSW), Jakarta Selatan. Di tempat terpisah, mantan pekerja PT Happy Ria Indonesia (HRI) yang memproduksi boneka kualitas ekspor menggelar aksi ke DPRD Bekasi.

Karyawan koperasi PLN menggelar aksi dengan tuntutan supaya diangkat statusnya dari karyawan honorer menjadi karyawan tetap PT PLN. Dari kantor PLN Kebayoran Baru, mereka melanjutkan aksinya ke Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) di Jl Sudirman. Dari sana berlanjut lagi ke Departemen Tenaga Kerja di Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Aksi berlangsung mulai pukul 10.30 WIB. Karyawan yang menamakan diri Komite Kedaulatan Rakyat (KKR) menggelar spanduk bertuliskan 'Dirut PT PLN melanggar SKB yang ditandatangani Menaker dan Dirut PT PLN'.

Mereka berteriak-teriak mengecam kebijakan Dirut PT PLN Eddie Widiono yang dituduh telah melanggar surat kesepakatan bersama (SKB) tentang pengangkatan karyawan honorer menjadi karyawan tetap di PT PLN.

Ketua KKR Hamdani yang memimpin demo menjelaskan aksi karyawan honorer koperasi PT PLN ini merupakan keinginan para karyawan yang tidak bisa lagi dibendung. "Antara Menakertrans dengan PT PLN telah menyepakati SKB yang ditandatangani April 2002. Dalam SKB disepakati karyawan honorer koperasi PT PLN bisa diangkat menjadi karyawan tetap," ungkap Hamdani.

Namun, katanya, sudah empat bulan berlalu, Dirut PT PLN belum juga mengeluarkan SK pengangkatan karyawan koperasi PT PLN meski Menakertrans sudah menyatakan sejak SKB ditandatangani, Dirut PT PLN bisa langsung mengeluarkan SK pengangkatan.

Aksi di Kantor PT PLN Kebayoran Baru tidak berlangsung lama karena Dirut PT PLN tidak bersedia menemui mereka. Dari kantor tersebut, karyawan kemudian melakukan aksi ke Kantor Menpan.

Di sana, mereka diterima Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) A Zainal, dengan catatan hanya perwakilan yang berbicara. Menurut Hamdani, Menpan

tidak bisa menemui karena sedang rapat kabinet di Istana Presiden. "Deputi SDM berjanji akan memanggil Dirut PT PLN dan berkoordinasi dengan Menteri Negara BUMN dan Menakertrans untuk membicarakan status kami," ujar Hamdani usai bertemu Deputi SDM.

Setengah jam kemudian, mereka mengalihkan aksi ke Depnakertrans di Jl Gatot Subroto.

Lagi-lagi tidak berhasil menemui menteri karena harus mengikuti rapat kabinet.

Dari Depnaker, mereka ke Kantor Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan penggelapan dana honorer karyawan sebesar Rp850 juta oleh pejabat PT PLN. Hamdani menegaskan, jika

tuntutan mereka tidak digubris, karyawan akan terus berdemo sampai tuntutannya dikabulkan.

Disandera

Sementara itu, pertikaian antara karyawan PT Happy Ria Indonesia (HRI) dengan karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin berlarut-larut. Pihak manajemen melaporkan ulah sejumlah karyawan ke Polres Bekasi karena

'menyandera' Siong Hoh Jee, presiden direktur perusahaan.

Di pihak lain, karyawan mendatangi DPRD dan Pemkab Bekasi. Mereka mendesak Dewan dan pemerintah memanggil Hoh Jee agar membayar pesangon dan tunggakan upah selama empat bulan.

Menurut laporan Aviva Warni, mewakili PT HRI, sebanyak 40 karyawan 'menyandera' Hoh Jee di ruang kerjanya selama sehari-hari dengan cara mengunci dari luar.

Aviva menjelaskan penyanderaan berawal dari aksi 700 karyawan yang menuntut pesangon. Namun, Hoh Jee menolak menu-ruti karena kasus PHK sudah ditangani Dinas Tenaga Kerja Be-

kasi.

Emmi, pengurus unit kerja PT HRI, menolak aksi mereka disebut 'penyanderaan'. Karyawan, katanya, datang ke pabrik untuk menagih janji Hoh Jee yang sebelumnya berjanji membayarkan pesangon. Setiba di pabrik boneka yang diekspor ke Amerika

Serikat itu, Hoh Jee menolak menemui.

Mantan pekerja bertahan di ruang tunggu hingga larut malam, sehingga Hoh Jee tidak bisa keluar dari ruang kerjanya. "Jumlah kami yang datang 700 orang, kenapa yang dilaporkan hanya 40 orang?" tanya Emmi yang ditemui di sela-sela pengaduan mereka ke DPRD Kabupaten Bekasi, kemarin. (Sht/KG/J-1)